



KANTOR STAF PRESIDEN



Money Follows Program,
Prinsip Baru untuk Prioritas Nasional 2017

Paradigma **Politik Anggaran** Berkembang dari Waktu ke Waktu

Masa Orde Baru



Anggaran
Berimbang dan
Dinamis

Keseimbangan antara
Belanja dan
Penerimaan Negara

Hingga RKP 2016



Anggaran
Berbasis Kinerja

Berorientasi pada
Tugas dan Fungsi
Kementerian/Lembaga

Mulai RKP 2017



Anggaran
Berbasis Program
Prioritas

Berorientasi pada
Program Prioritas
untuk Mencapai Tujuan
**Pembangunan
Nasional**

Permasalahan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan



Anggaran Berbasis Kinerja

- I. Alokasi anggaran ditentukan terlebih dahulu untuk setiap Kementerian/Lembaga.
- II. Rincian setiap unit kerja (I, II, III, dan IV) ditentukan alokasi anggaran berdasarkan fungsinya.

Setiap Unit Kerja (Eselon I, II, III, dan IV) mendapatkan anggaran baik terdapat program prioritas maupun tidak



**Duplikasi Program
dan Kegiatan**



**Inefisiensi
Anggaran**



**Tantangan dalam
Berkoordinasi**

Paradigma Program Prioritas

Pada Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan



Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional



Menteri dan Kepala Lembaga harus mengendalikan anggaran di setiap instansi yang dipimpinnya



Tidak ada lagi program dengan nomenklatur tidak jelas

Anggaran Berbasis Program Prioritas

- I. Rancangan Program Prioritas disusun terlebih dahulu
- II. Kementerian/Lembaga KL menyusun kegiatan berdasarkan program prioritas dan tugas dan fungsinya.



**Holistik
Tematik**



Integratif



Spasial

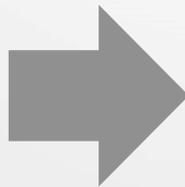
~~Money Follow Function~~ -> **Money Follow Program Prioritas**

Paradigma Perencanaan dan Penganggaran **Telah Berubah**



Money Follows Function

- Duplikasi Program
- Inefisiensi Anggaran
- Sulit Koordinasi



Money Follows Program

- **Holistik – Tematik**
- **Integratif**
- **Spasial**



KANTOR STAF PRESIDEN



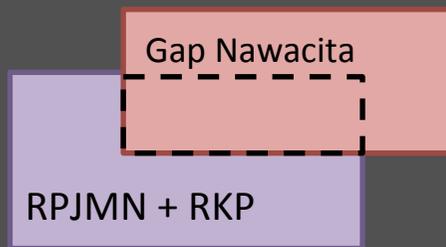
Gap Nawacita



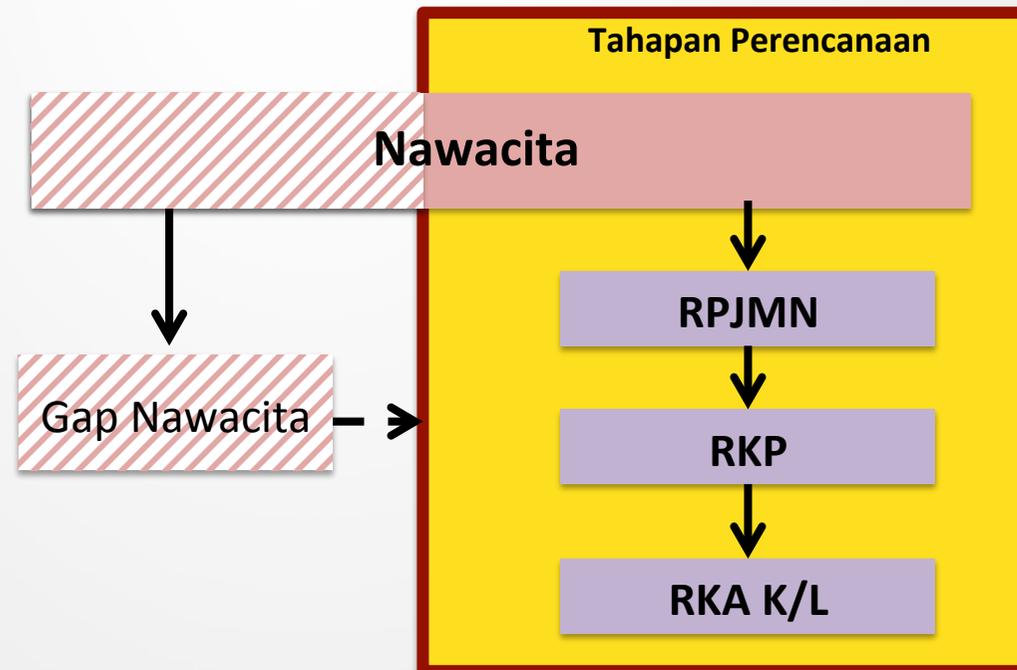
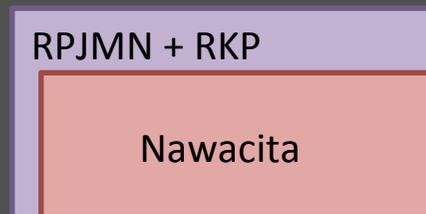
Terdapat Gap Nawacita dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Memastikan agar secara konsisten RPJMN dan RKP sesuai dengan Nawacita

Kondisi saat ini

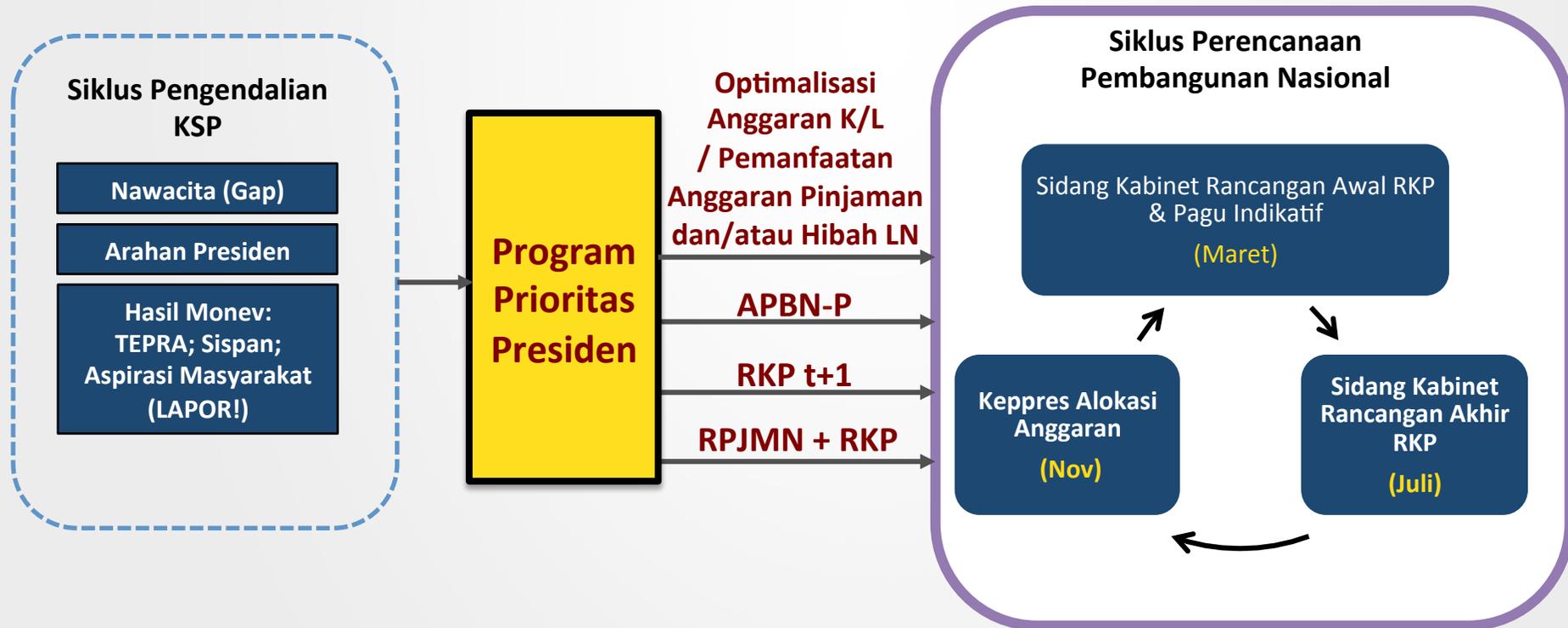


Seharusnya





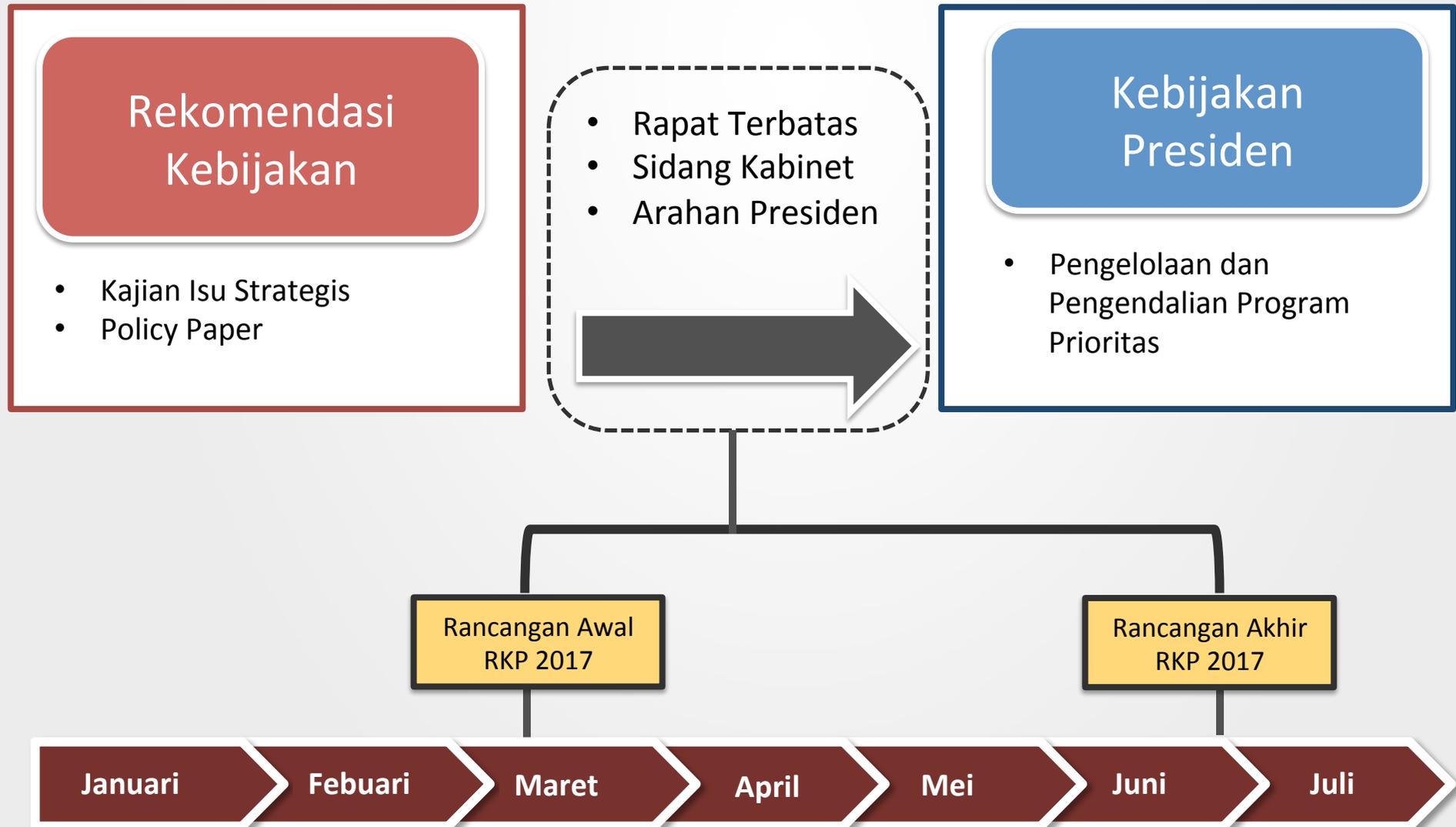
4 Pintu Gerbang untuk Penyelarasan Program Prioritas Presiden untuk Perencanaan Pembangunan Nasional 2017



Umpan balik dari proses pengendalian yang diakomodir dalam proses perencanaan



Pintu Gerbang Isu Strategis dan Program Prioritas





Pengelompokkan Tematik Prioritas Nasional 2017



Tematik Perencanaan Prioritas Nasional Bappenas 2017

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Kemaritiman dan Kelautan | 11. Konsolidasi Demokrasi dan Efektifitas Diplomasi |
| 2. Pendidikan | |
| 3. Kesehatan | |
| 4. Kedaulatan Pangan | 12. Konektivitas |
| 5. Industri & KEK | 13. Daerah Perbatasan |
| 6. Kedaulatan Energi | |
| 7. Pariwisata | 14. Desa dan Kawasan Perdesaan |
| 8. Kesejahteraan Rakyat | 15. Daerah Tertinggal |
| 9. Kepastian dan Penegakan Hukum | 16. Perumahan dan Pemukiman |
| 10. Reformasi Birokrasi | 17. Revolusi Mental |
| | 18. Perkotaan |

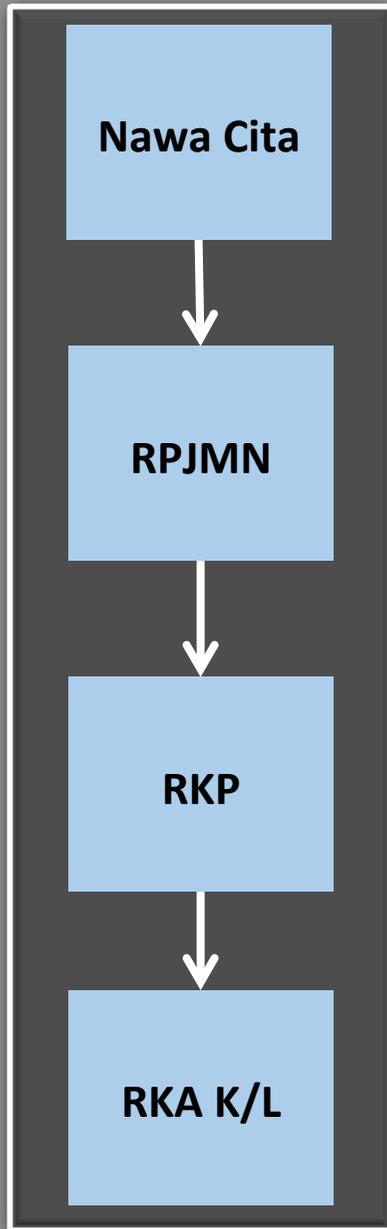
Link:

<http://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/penyusunan-rencana-kerja-pemerintah-2017/>



Pendekatan Baru untuk Monev 2016

Program Prioritas Presiden

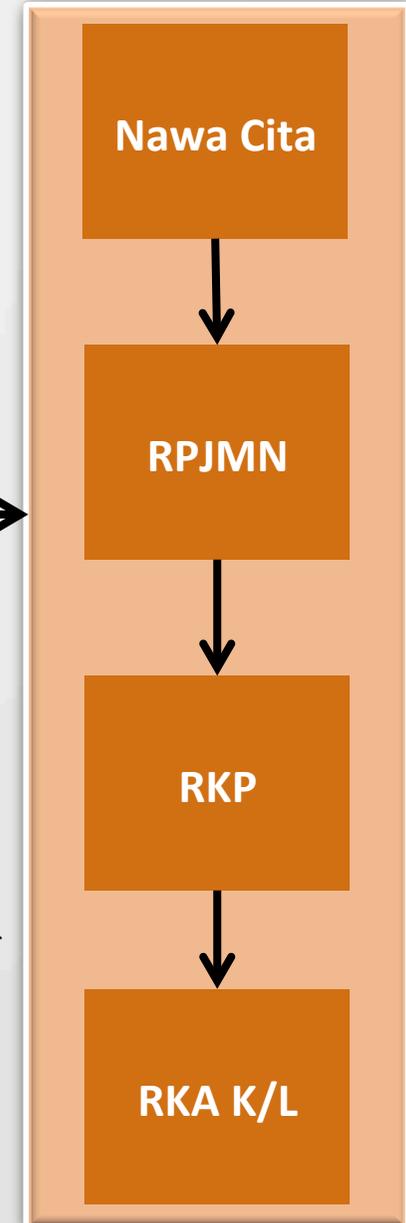
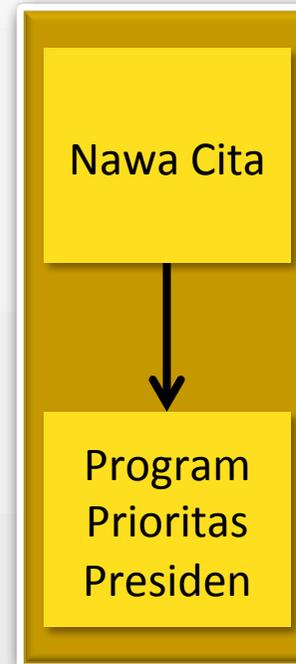


s.d. 2015

Diekstrak dan didalami untuk menjadi Program Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional

Mulai 2016



- Berangkat dari cita-cita besar, bukan dari kegiatan teknis parsial
- Memastikan kegiatan benar-benar **strategis**, berdampak **signifikan**, dan **diinginkan Presiden**
- Mencari **hal-hal penting yang terlewatkan** (*missing link*)
- Memudahkan perencanaan, pengendalian, dan pelaporan



TEMA-TEMA MONEV KANTOR STAF PRESIDEN 2016

**Monev Kantor Staf Presiden
adalah terhadap Program
Prioritas 2016 dengan
menggunakan Pendekatan
Tematik**



KANTOR STAF PRESIDEN

Tematik Monev Program Prioritas

1. Tol Laut
2. Bangsa Berkarakter dan Berdaya Saing
3. Kedaulatan Pangan
4. Reforma Agraria
5. Industri
6. Ketahanan Energi
7. Pariwisata
8. Bantuan Sosial
9. Penegakan Hukum
10. Reformasi Birokrasi
11. Pembangunan Papua
12. Infrastruktur Transportasi
13. Pengembangan Kawasan Perbatasan
14. Pembangunan Desa
15. Optimalisasi Penerimaan Negara
16. Peningkatan Kualitas Belanja



Akhir dari Presentasi
Terima Kasih